Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	3

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD Soroti Pemberian Dana Hibah Rp 23 Miliar Satpol PP

♦ Dinilai Kurang Tepat

JAKARTA (Poskota) - Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja komisi terkait dana hibah yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di ruang rapat Komsi A DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Thopaz Nuhgraha Syamsul menyoroti tajam pembelian kendaraan operasional sebesar Rp11 miliar rupiah. Ia menilai semestinya alokasi hibah diberikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita, dewan mengawasinya kok ada hibah Rp11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional. Itukan kurang tepat lah, bukan tidak benar tapi kurang tepat," ujar Thopaz.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan, bahwa ini buntut dari pembahasan badan anggaran (banggar) DPRD DKI. Bahkan ia menyebut ada yang lupa dalam memasukan anggaran Rp1,9 triliun ke rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023. Sehingga berdampak ke dana hibah yang seharusnya dapat bermanfaat untuk masuarakat.

"Jadi saya bersuara keras, mungkin ini buntut dari pembahasan bangar kemarin yang ketika pembahasan banggar sampe setengah empat pagi ada kelupaan memasukan Rp 1,9 triliun ke pembahasan RKPD," katanya.

"Ya akhirnya berdampak pada hibah-hibah yang harusnya bermutual benefit kepada masyarakat DKI di take off. Dan kita gak sadar ada masuk 11 miliar, makanya saya baru tau har ini. Apalagi gak bermanfaat untuk warga DKI," tuturnya menambahkan.

Karena itu, ke depannya Thopaz mendesak agar RKPD hibah ditentukan Pemprov DKI bersama anggota Dewan. Menurutnya, ini merupakan upaya menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami berharap, Pimpinan, hibah itu kan bukan kebutuhan primer maupun sekunder Satpol PP. Ini bicara mutual benefit, bicara kita mampu atau tidak. Jadi penentuan RKPD hibah saya rasa wajib Pimpinan melibatkan kita Komisi A," tegasnya.

Diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah sebesar Rp23 miliar kepada dua instansi yakni, Kodam Jaya dan Korps Marinir Pasmar 1. Adapun rincian dana hibah sebagai berikut: Rp11 miliar Kodam Jaya yang rencananya diperuntukkan buat mengadakan sejumlah kendaraan dinas seperti, 1 unit mobil Land Cruiser, 1 unit mobil Prado, 2 unit mobil Fortuner, juga 6 unit mobil Innova.

Sementara dana hibah Rp 12,19 miliar untuk Koprs Marinir Pasmar 1 rencananya digunakan untuk membeli peralatan perlengkapan antihuru-hara. **(aldi/yh)**